

BAB II

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Yogyakarta

1. Sejarah Singkat Kota Yogyakarta

Berdirinya Kota Yogyakarta berawal dari adanya Perjanjian Gianti pada Tanggal 13 Februari 1755 yang ditandatangani Kompeni Belanda di bawah tanda tangan Gubernur Nicholas Hartingh atas nama Gubernur Jendral Jacob Mossel. Isi Perjanjian Gianti : Negara Mataram dibagi dua : Setengah masih menjadi Hak Kerajaan Surakarta, setengah lagi menjadi Hak Pangeran Mangkubumi. Dalam perjanjian itu pula Pengeran Mangkubumi diakui menjadi Raja atas setengah daerah Pedalaman Kerajaan Jawa dengan Gelar Sultan Hamengku Buwono Senopati Ing Alega Abdul Rachman Sayidin Panatagama Khalifatullah.

Adapun daerah-daerah yang menjadi kekuasaannya adalah Mataram (Yogyakarta), Pojong, Sukowati, Bagelen, Kedu, Bumigede dan ditambah daerah mancanegara yaitu; Madiun, Magetan, Cirebon, Separuh Pacitan, Kartosuro, Kalangbret, Tulungagung, Mojokerto, Bojonegoro, Ngawen, Sela, Kuwu, Wonosari, Grobogan.

Setelah selesai Perjanjian Pembagian Daerah itu, Pengeran Mangkubumi yang bergelar Sultan Hamengku Buwono I segera

... Daerah Mataram yang ada di dalam kekuasaannya itu

diberi nama Ngayogyakarta Hadiningrat dan beribukota di Ngayogyakarta (Yogyakarta). Ketetapan ini diumumkan pada tanggal 13 Maret 1755.

Tempat yang dipilih menjadi ibukota dan pusat pemerintahan ini ialah Hutan yang disebut Beringin, dimana telah ada sebuah desa kecil bernama Pachetokan, sedang disana terdapat suatu pesanggrahan dinamai Garjitowati, yang dibuat oleh Susuhunan Paku Buwono II dulu dan namanya kemudian diubah menjadi Ayodya. Setelah penetapan tersebut diatas diumumkan, Sultan Hamengku Buwono segera memerintahkan kepada rakyat membabad hutan tadi untuk didirikan Kraton.

Sebelum Kraton itu jadi, Sultan Hamengku Buwono I berkenan menempati pasanggrahan Ambarketawang daerah Gamping, yang tengah dikerjakan juga. Menempatnya pesanggrahan tersebut resminya pada tanggal 9 Oktober 1755. Dari tempat inilah beliau selalu mengawasi dan mengatur pembangunan kraton yang sedang dikerjakan.

Setahun kemudian Sultan Hamengku Buwono I berkenan memasuki Istana Baru sebagai peresmianya. Dengan demikian berdirilah Kota Yogyakarta atau dengan nama utuhnya ialah Negari Ngayogyakarta Hadiningrat. Pesanggrahan Ambarketawang ditinggalkan oleh Sultan Hamengku Buwono untuk berpindah menetap di Kraton yang baru.

Kota Yogyakarta dibangun pada tahun 1755, bersamaan dengan dibangunnya Kerajaan Ngayogyakarta Hadiningrat oleh Sri Sultan Hamengku Buwono I di Hutan Beringin, suatu kawasan diantara sungai Winongo dan sungai Code dimana lokasi tersebut nampak strategi menurut segi pertahanan keamanan pada waktu itu.

Sesudah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII menerima piagam pengangkatan menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi DIY dari Presiden RI, selanjutnya pada tanggal 5 September 1945 beliau mengeluarkan amanat yang menyatakan bahwa daerah Kesultanan dan daerah Pakualaman merupakan Daerah Istimewa yang menjadi bagian dari Republik Indonesia menurut pasal 18 UUD 1945. Dan pada tanggal 30 Oktober 1945, beliau mengeluarkan amanat kedua yang menyatakan bahwa pelaksanaan Pemerintahan di Daerah Istimewa Yogyakarta akan dilakukan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII bersama-sama Badan Pekerja Komite Nasional

Meskipun Kota Yogyakarta baik yang menjadi bagian dari Kesultanan maupun yang menjadi bagian dari Pakualaman telah dapat membentuk suatu DPR Kota dan Dewan Pemerintahan Kota yang dipimpin oleh kedua Bupati Kota Kasultanan dan Pakualaman, tetapi Kota

... ..

kekuasaan otonomi yang meliputi berbagai bidang pemerintahan masih tetap berada di tangan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kota Yogyakarta yang meliputi daerah Kasultanan dan Pakualaman baru menjadi Kota Praja atau Kota Otonomi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1947, dalam pasal I menyatakan bahwa Kabupaten Kota Yogyakarta yang meliputi wilayah Kasultanan dan Pakualaman serta beberapa daerah dari Kabupaten Bantul yang sekarang menjadi Kecamatan Kotagede dan Umbulharjo ditetapkan sebagai daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Daerah tersebut dinamakan Haminte Kota Yogyakarta.

Untuk melaksanakan otonomi tersebut Walikota pertama yang dijabat oleh Ir.Moh Enoh mengalami kesulitan karena wilayah tersebut masih merupakan bagian dari Daerah Istimewa Yogyakarta dan statusnya belum dilepas. Hal itu semakin nyata dengan adanya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, di mana Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Tingkat I dan Kotapraja Yogyakarta sebagai Tingkat II yang menjadi bagian Daerah Istimewa Yogyakarta.

Selanjutnya Walikota kedua dijabat oleh Mr.Soedarisman Poerwokusumo yang kedudukannya juga sebagai Badan Pemerintah Harian serta merangkap menjadi Pimpinan Legislatif yang pada waktu itu

baru dibentuk pada tanggal 5 Mei 1958 dengan anggota 20 orang sebagai hasil Pemilu 1955.

Dengan kembali ke UUD 1945 melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959, maka Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 diganti dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, tugas Kepala Daerah dan DPRD dipisahkan dan dibentuk Wakil Kepala Daerah dan badan Pemerintah Harian serta sebutan Kota Praja diganti Kotamadya Yogyakarta.

Atas dasar Tap MPRS Nomor XXI/MPRS/1966 dikeluarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Berdasarkan Undang-undang tersebut, DIY merupakan Propinsi dan juga Daerah Tingkat I yang dipimpin oleh Kepala Daerah dengan sebutan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta dan Wakil Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta yang tidak terikat oleh ketentuan masa jabatan, syarat dan cara pengangkatan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah lainnya, khususnya bagi beliau Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII. Sedangkan Kotamadya Yogyakarta merupakan daerah Tingkat II yang dipimpin oleh Walikota Kepala Daerah Tingkat II dimana terikat oleh ketentuan

... .. 1. pengangkatan bagi Kepala Daerah Tingkat II

Seiring dengan bergulirnya era-reformasi, tuntutan untuk menyelenggarakan pemerintahan di daerah secara otonom semakin mengemuka, maka keluarlah Undang-undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur kewenangan Daerah menyelenggarakan otonomi daerah secara luas,nyata dan bertanggung jawab. Sesuai UU ini maka sebutan untuk Kotamadya Dati II Yogyakarta diubah menjadi Kota Yogyakarta sedangkan untuk pemerintahannya disebut denan Pemerintahan Kota Yogyakarta dengan Walikota Yogyakarta sebagai Kepala Daerahnya.

2. Kondisi Geografis Kota Yogyakarta

a) Letak Wilayah

Kota Yogyakarta terletak antara $110^{\circ}24'19''$ - $110^{\circ}28'53''$ Bujur Timur dan antara $07^{\circ}49'26''$ - $07^{\circ}15'24''$ Lintang Selatan, dengan luas sekitar $32,5 \text{ Km}^2$ atau 1,02% dari luas wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Jarak terjauh dari Utara ke Selatan kurang lebih 7,5 Km dan Barat ke Timur kurang lebih 5,6 Km.

Kota Yogyakarta yang terletak di daerah dataran lereng aliran gunung Merapi memiliki kemiringan lahan yang relatif datar (antara 0-2%) dan berada pada ketinggian rata-rata 114 meter dari permukaan air laut (dpa). Sebagian wilayah dengan luas 1.657 hektar terletak pada ketinggian kurang dari 100 meter dan sisanya (1.593 hektar) berada pada

Terdapat 3 sungai yang mengalir dari arah Utara ke Selatan yaitu :
Sungai Gajahwong yang mengalir di bagian timur kota, Sungai Code dibagian tengah, dan sungai Winongo dibagian barat kota.

Gambar 2.1
Peta Kota Yogyakarta



Secara administratif Kota Yogyakarta terdiri dari 14 kecamatan dan 45 kelurahan dengan batas wilayah :

- | | |
|-----------------|-------------------------------|
| Sebelah Utara | : Kabupaten Sleman |
| Sebelah Timur | : Kabupaten Bantul dan Sleman |
| Sebelah Selatan | : Kabupaten Bantul |
| Sebelah Barat | : Kabupaten Bantul dan Sleman |

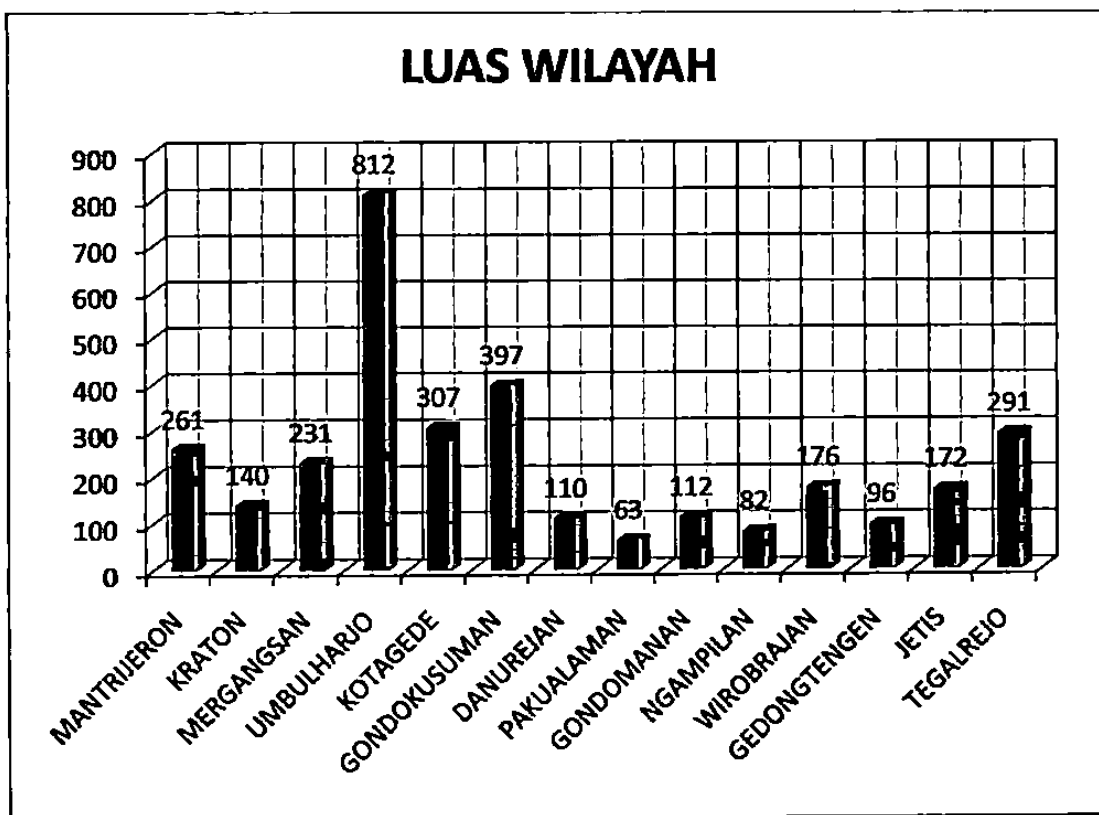
b) Luas Wilayah

Kota Yogyakarta memiliki luas wilayah tersempit dibandingkan

luas wilayah Provinsi DIY. Dengan luas 3.250 hektar tersebut terbagi menjadi 14 kecamatan, 45 kelurahan, 617 RW, dan 2.531 RT, serta dihuni oleh. Kondisi tanah Kota Yogyakarta cukup subur dan memungkinkan ditanami berbagai tanaman pertanian maupun perdagangan, disebabkan oleh letaknya yang berada didataran lereng gunung Merapi (fluvia volcanic foot plain) yang garis besarnya mengandung tanah regosol atau tanah vulkanis muda.

Grafik : 2.1

Luas Wilayah Kota Yogyakarta menurut Kecamatan 2011



Dari empat belas (14) kecamatan yang ada di Kota Yogyakarta,

luas yaitu 261, sedangkan Kecamatan Pakualaman memiliki luas area paling kecil yakni 63.

Tabel : 2.1

Luas Wilayah, Jumlah RT dan RW menurut Kecamatan dan Kelurahan di Kota Yogyakarta 2011

Kecamatan	Kelurahan	Luas Area	Jumlah RT	Jumlah RW
1.MANTRIJERON	1.Gedongkiwo	0,90	18	86
	2.Suryodiningratan	0,85	17	69
	3.Mantrijeron	0,86	20	75
		2,61	55	230
2.KRATON	1.Patehan	0,40	10	44
	2.Penembahan	0,66	18	78
	3.Kadipaten	0,34	15	53
		1,40	43	175
3.MERGANGSAN	1.Brontokusuman	0,93	23	83
	2.Keparakan	0,53	13	57
	3.Wirogunan	0,85	24	76
		2,31	60	216
4.UMBULHARJO	1.Giwangan	1,26	13	42
	2,Sorosutan	1,68	16	63
	3.Pandean	1,38	12	49
	4.Warungboto	0,83	9	38
	5.Tahunan	0,78	11	48
	6.Muja-Muju	1,53	12	55
	7.Semaki	0,66	10	34
		8,12	83	329
5.KOTAGEDE	1.Prenggan	0,99	13	57
	2.Purbayan	0,83	14	58
	3.Rejowinangun	0,25	13	49

		3,07	40	164
6.GONDOKUSUMAN	1.Baciro	1,03	21	87
	2.Demangan	0,74	12	44
	3.Klitren	0,68	16	63
	4.Kotabaru	0,71	4	20
	5.Terban	0,80	12	59
		3,97	65	273
7.DANUREJAN	1.Suryatmajan	0,28	15	45
	2.Tegalpanggung	0,35	16	66
	3.Bausasran	0,47	12	49
		1,10	43	160
8.PAKUALAMAN	1.Purwokinanti	0,33	10	47
	2.Gunungketur	0,30	9	36
		0,63	19	83
9.GANDOMANAN	1.Prawirodirjan	0,67	18	61
	2.Ngupasan	0,45	13	49
		1,12	31	110
10.NGAMPILAN	1.Notoprajan	0,37	8	50
	2.Ngampilan	0,45	13	70
		0,82	21	120
11.WIROBRAJAN	1.Patangpuluhan	0,44	10	51
	2.Wirobrajan	0,67	12	58
	3.Pakuncen	0,65	12	56
		1,76	34	165
12.GEDONGTENGEN	1.Peringgokusuman	0,46	14	54
	2.Sosromenduran	0,50	23	89
		0,96	37	143
13.JETIS	1.Bumijo	0,59	13	56
	2.Gowongan	0,47	13	52
	3.Cokrodirigratan	0,66	11	60

		1,72	37	168
14.TEGALREJO	1.Tegalrejo	0,82	7	25
	2.Bener	0,57	12	46
	3.Kricak	0,82	13	61
	4.Karangwaru	0,70	14	56
		2,91	46	188
J u m l a h/Total	45	32,50	614	2.524

Sumber : BPS Kota Yogyakarta

c) Topografi

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terletak di bagian selatan tengah Pulau Jawa yang dibatasi oleh Samudera Hindia di bagian selatan dan Propinsi Jawa Tengah di bagian lainnya. Batas dengan Propinsi Jawa Tengah meliputi:

- Kabupaten Wonogiri di bagian tenggara
- Kabupaten Klaten di bagian timur laut
- Kabupaten Magelang di bagian barat laut
- Kabupaten Purworejo di bagian barat

Secara astronomis, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terletak antara $70^{\circ} 33' \text{ LS} - 8^{\circ} 12' \text{ LS}$ dan $110^{\circ} 00' \text{ BT} - 110^{\circ} 50' \text{ BT}$. Komponen fisiografi yang menyusun Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri dari 4 (empat) satuan fisiografis yaitu Satuan Pegunungan Selatan (Dataran Tinggi Karst) dengan ketinggian tempat berkisar antara 150 - 700

antara 80 - 2.911 meter, Satuan Dataran Rendah yang membentang antara Pegunungan Selatan dan Pegunungan Kulonprogo pada ketinggian 0 - 80 meter, dan Pegunungan Kulonprogo dengan ketinggian hingga 572 meter.

Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai luas 3.185,80 km², terdiri dari 4 kabupaten dan 1 Kota, yaitu Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, dan Kabupaten Kulonprogo. Setiap kabupaten/kota mempunyai kondisi fisik yang berbeda sehingga potensi alam yang tersedia juga tidak sama. Perbedaan kondisi fisik ini ikut menentukan dalam rencana pengembangan daerah.

Potensi airtanah dan keberadaan air permukaan satu daerah tidak sama dengan daerah lainnya walaupun keduanya mempunyai curah hujan yang sama. Hal ini disebabkan kondisi lahan (geologi, geomorfologi, dan tanah) setiap daerah berbeda. Perbedaan-perbedaan ini akhirnya membawa keberagaman dalam potensi sumberdaya alam dan potensi kebencanaan alam sehingga antara pengembangan sumberdaya alam daerah harus memperhatikan potensi-potensi alam tersebut. Pengembangan suatu potensi sumberdaya alam harus memperhatikan sifat dari sumberdaya yang akan dikembangkan, yaitu apakah sumberdaya alam tersebut berupa cadangan (tak terbarui, misalnya tambang mineral/batuan) atau sebagai sumberdaya alam yang terbarui (terbarui, misalnya biota). Dengan

kesinambungan pemanfaatan dan kelestarian lingkungan. Kekeliruan pengembangan sumberdaya alam selain berdampak pada degradasi sumberdaya alam bersangkutan juga berperan dalam memicu terjadinya bencana alam yang berakibat sangat merugikan.

3. Kondisi Demografi Kota Yogyakarta

a) Penduduk

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2010 jumlah penduduk tahun 2010 tercatat 388.627 orang. Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin adalah 48.67 persen laki-laki dan 51.33 persen perempuan. Secara keseluruhan jumlah penduduk perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk laki-laki seperti tampak dari rasio jenis kelamin penduduk yang lebih kecil dari 100, dimana pada tahun 2010 sebesar 94.81.

Jumlah penduduk Kota Yogyakarta pada tahun 2011 sebanyak 390.554 orang dengan rincian sebanyak 190.075 orang penduduk laki-laki dan 200.479 orang penduduk perempuan. Rasio jenis kelamin adalah perbandingan antara banyaknya penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu. Biasanya dinyatakan dengan banyaknya penduduk laki-laki untuk 100 penduduk perempuan. Dengan luas wilayah 32,50 km², kepadatan penduduk Kota Yogyakarta 12.017 jiwa per km². Kepadatan penduduk di Kota Yogyakarta termasuk kedalam kategori padat penduduk.

Tabel : 2.2

**Kepadatan dan Pertumbuhan Penduduk Kota Yogyakarta Hasil Sensus
Penduduk dan SUPAS 1971-2010**

Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan (jiwa / km²)	Pertumbuhan Penduduk (%)
1971	340.908	10.489	0,90
1980	398.192	12.252	1,72
1990	412.059	12.679	0,35
1995	418.944	12.891	0,33
2000	397.398	12.228	-0,37
2005	435.236	13.392	1,87
2010	388.627	11.958	-2,24

Sumber : BPS Kota Yogyakarta

Kepadatan dan Pertumbuhan Penduduk Kota Yogyakarta Hasil Sensus Penduduk dan SUPAS 1971-2010 berdasarkan pengamatan hasil tabel diatas cenderung meningkat ditiap tahunnya.

Tabel : 2.3

**Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Yogyakarta
2011**

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0 – 4	13.207	12.390	25.597
5 – 9	12.917	12.224	25.141
10 – 14	13.058	12.302	25.360
15 – 19	18.773	21.123	39.896
20 – 24	24.600	25.762	50.362
25 – 29	18.831	17.312	36.143
30 – 34	15.043	14.847	29.890
35 – 39	13.624	14.087	27.711
40 – 44	13.164	14.505	27.669

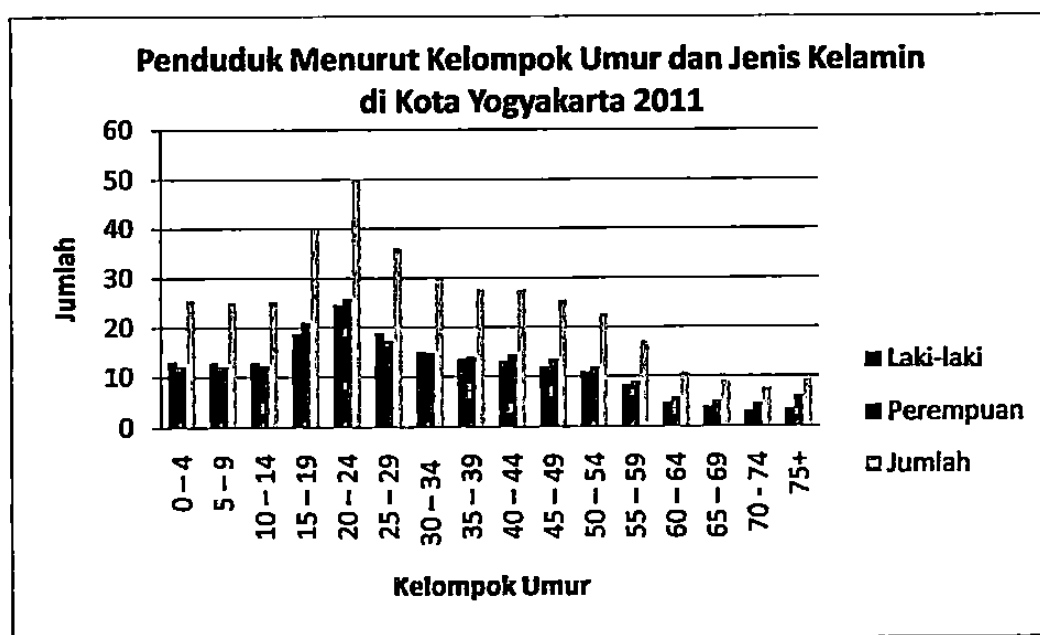
45 – 49	11.974	13.531	25.505
50 – 54	10.948	11.923	22.871
55 – 59	8.392	8.941	17.333
60 – 64	4.916	5.864	10.780
65 – 69	3.965	5.170	9.135
70 - 74	3.095	4.510	7.605
75+	3.568	5.988	9.556
Jumlah/Total	190.075	200.479	390.554

Sumber : BPS Kota Yogyakarta

Adapun bar chart yang memperlihatkan kelompok umur dan jenis kelamin di Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

GRAFIK 2.2

Bar Chart Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Yogyakarta 2011



Sumber : BPS Kota Yogyakarta

Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Yogyakarta paling tinggi jumlahnya terdapat pada kelompok umur 20 – 24

orang dan perempuan 25.762 orang. Sedangkan jumlah penduduk menurut kelompok umur paling rendah terdapat pada kelompok umur 70-74 dengan jumlah total 7.605 dengan persentase jumlah laki-laki 3.095 orang dan perempuan 4.510 orang.

Tabel : 2.4

Luas Wilayah, Penduduk menurut Jenis Kelamin dan Kepadatan Penduduk di Kota Yogyakarta 2011

Kecamatan	Luas Wilayah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Kepadatan Penduduk
1.MANTRIJERON	2,61	15.265	16.156	31.421	12.039
2.KRATON	1,40	8.370	9.187	17.557	12.541
3.MERGANGSAN	2,31	14.446	14.991	29.437	12.743
4.UMBULHARJO	8,12	37.298	39.829	77.127	9.498
5.KOTAGEDE	3,07	15.593	15.715	31.308	10.198
6.GONDOKUSUMAN	3,97	22.024	23.493	45.517	11.465
7.DANUREJAN	1,10	9.065	9.368	18.433	16.757
8.PAKUALAMAN	0,63	4.539	4.823	9.362	14.860
9.GANDOMANAN	1,12	6.125	6.968	13.093	11.690
10.NGAMPILAN	0,82	7.638	8.763	16.401	20.001
11.WIROBRAJAN	1,76	12.634	12.328	24.962	14.183
12.GEDONGTENGEN	0,96	8.218	9.052	17.270	17.990
13.JETIS	1,72	11.508	12.062	23.570	13.703
14.TEGALREJO	2,91	17.352	17.744	35.096	12.060
Jumlah/Total	32,50	190.075	200.479	390.55	12.017

4. Kondisi Sosial Politik Kota Yogyakarta

Sejak resmi lahirnya Kota Yogyakarta pada Tanggal 13 Februari 1947, terdapat Sembilan orang Walikota yang menjabat sebagai Kepala Daerah tingkat II di bawah Gubernur. Walikota Yogyakarta yang pertama adalah M. Enoch (Mei 1947- Juli 1947) dan dilanjutkan oleh Mr. Soedarisman Poerwokoesoemo (Juli 1947 – Januari 1966). Walikota Yogyakarta yang ketiga adalah Soedjono A. Y. yang menjabat selama sepuluh tahun, yaitu pada (Januari 1966 – November 1975). Kemudian pengabdian Soedjono dilanjutkan oleh Walikota keempat yaitu H. Ahmad pada periode (November 1975 – Mei 1981). Dan periode berikutnya adalah Soegiarto (1981-1986) satu periode. Djatmiko D pada (1986-1991) satu periode. R. Widagdo dua periode (1991-2001). Herry Zudianto juga menjabat dua periode kepemimpinannya yaitu pada (2001-2011). Sedangkan untuk periode 2011 hingga sekarang kursi Walikota Yogyakarta di jabat oleh Drs. H. Haryadi Suyuti.

Saat ini, Kota Yogyakarta terdiri dari 14 (empat belas) Kecamatan yang terbagi kedalam 45 Kelurahan/Desa yang secara keseluruhan terbagi dalam 617 RW, dan 2.531 RT. Kecamatan atau Kelurahan tersebut adalah Kecamatan Mantriweron (3 Desa/Kelurahan 55 RW dan 230 RT), Kecamatan Kraton (3 Desa/Kelurahan 43 RW dan 175 RT), Kecamatan Mergangsan (3 Desa/Kelurahan 60 RW dan 216 RT), Kecamatan Umbulharjo (7 Desa/Kelurahan 83 RW dan 329 RT), Kecamatan Kotagede (3 Desa/Kelurahan 40 RW dan 164 RT), Kecamatan

Danurejan (3 Desa/Kelurahan 43RW dan 160 RT), Kecamatan Pakualaman (2 Desa/Kelurahan 19 RW dan 83 RT), Kecamatan Gondomanan (2 Desa/Kelurahan 31 RW dan 110 RT), Kecamatan Ngampilan (2 Desa/Kelurahan 21 RW dan 120 RT), Kecamatan Wirobrajan (3 Desa/Kelurahan 34 RW dan 165 RT), Kecamatan Gedongtengen (2 Desa/Kelurahan 37 RW dan 143 RT), Kecamatan Jetis (3 Desa/Kelurahan 37 RW dan 168 RT), dan Kecamatan Tegaltrejo (4 Desa/Kelurahan 46 RW dan 188 RT).

B. GAMBARAN UMUM KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA YOGYAKARTA

1. Keanggota KPU

Perekrutan anggota KPU Kota Yogyakarta dibentuk melalui seleksi yang menunjuk pada SK Walikota tentang pembentukan Tim Seleksi anggota KPUD. Adapun calon-calon anggota yang dapat mencalonkan diri adalah :

- a) Non Partisan
- b) Jika seorang PNS, maka bersedia melepas semua jabatannya, baik structural maupun fungsional.

Pada tahap penyeleksian, para calon diminta untuk menggambarkan visi dan misinya sebanyak 5 (lima) lembar HVS dan setelah persyaratan administrasinya selesai, maka Pemda mengumumkan calon-calon tersebut kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat berperan langsung dalam memberikan opini atau laporan-laporan terkait calon-calon tersebut. Dan untuk hal ini diberikan waktu 5 hari. Tahap akhir seleksi adalah Fit and

...

menjadi 5 orang dengan sistem pergantian antar waktu dengan lama kontrak 5 tahun.

Tabel : 2.5

**KOMPOSISI PERSONALIA KPU
KOTA YOGYAKARTA PERIODE 2008 – 2013**

NO	NAMA	JABATAN	KET
1.	Nasrullah, S.H.,S.Ag.,M.CL	Ketua KPU (Divisi Hukum dan Pengawasan)	
2.	Sunaji SSi,. MS.i	Anggota KPU (Divisi Perencanaan, Logistik, dan Keuangan)	
3.	Wawan Budiyanto, S.Ag, MSI	Anggota KPU (Divisi Umum, Rumah Tangga dan Organisasi)	
4.	Titok Hariyanto, S.IP	Anggota KPU (Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Hupmas dan SDM)	
5.	Aan Kurniasih,SH.	Anggota KPU (Divisi Penyelenggara dan Data Informasi)	

Sumber : Sekertariat KPU Kota Yogyakarta

Komposisi personalia KPU Kota Yogyakarta periode 2008-2013

merupakan komposisi kepengurusan yang menjalankan tahapan verifikasi

... 2014 di Kota Yogyakarta. Dengan diketuai oleh

bapak Nasrullah, S.H.,S.Ag.,M.CL yang juga merupakan seorang dosen Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) hingga tahapan verifikasi Parpol sebagai calon peserta Pemilu tahun 2014 selesai dan sampai pada penetapan Parpol yang memenuhi syarat dan yang tidak memenuhi syarat. Kemudian kepengurusan ini dilanjutkan oleh komposisi personalia yang baru untuk periode 2013-2018.

Tabel : 2.6

**KOMPOSISI PERSONALIA KPU
KOTA YOGYAKARTA PERIODE 2013 – 2018**

NO	NAMA	JABATAN	KET
1.	Wawan Budiyanto, S.Ag, MSI	Ketua KPU (Divisi Hukum dan Pengawasan)	
2.	Hidayat Widodo, S.IP	Anggota KPU (Divisi Perencanaan, Logistik, dan Keuangan)	
3.	R. Moeh N. Aris Munandar, SE.	Anggota KPU (Divisi Umum, Rumah Tangga dan Organisasi)	
4.	Sri Surani, SP	Anggota KPU (Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Hupmas dan SDM)	
5.	Siti Nurhayati, S.S.	Anggota KPU (Divisi Penyelenggara dan	

		Data Informasi)	
--	--	-----------------	--

Sumber : Sekertariat KPU Kota Yogyakarta

Kemudian untuk komposisi personalia kepengurusan periode 2013-2018 ini diketuai oleh bapak Wawan Budiyanto, S.Ag, MSI yang merupakan anggota dari kepengurusan periode sebelumnya dan mempunyai jabatan devisi umum, rumah tangga dan organisasi dalam tahapan verifikasi Parpol calon peserta Pemilu 2014.

2. Tugas dan Fungsi KPU Kabupaten/Kota

a. Tugas

1. Merencanakan penyelenggaraan Pemilu.
2. Menetapkan organisasi dan tata cara semua tahapan pelaksanaan Pemilu.
3. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan Pemilu.
4. Menetapkan peserta Pemilu.
5. Menetapkan daerah pilihan, jumlah kursi dan calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota.
6. Menetapkan waktu, tanggal, tata cara pelaksanaan kampanye, dan pemungutan suara.
7. Menetapkan hasil Pemilu dan mengumumkan calon terpilih Anggota, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
8. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilu.

b. Fungsi

1. Penyusunan program dan anggaran Pemilu di Kabupaten/Kota.
2. Pemberian pelayanan teknis pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten/Kota.
3. Pemberian pelayanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, anggaran, dan perlengkapan.
4. Perumusan dan penyusunan bantuan serta penyelesaian masalah dan sengketa hukum.
5. Pemberian dan pelayanan informasi Pemilu, partisipasi masyarakat dan penyelenggaraan hubungan masyarakat bagi keperluan pemilihan umum di Kabupaten/Kota.
6. Pengelolaan data Pemilu di Kabupaten/kota.
7. Pengelolaan logistik dan distribusi barang/jasa keperluan pemilihan umum.
8. Pelaksanaan kerjasama antar lembaga.
9. Penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggung jawaban KPU Kabupaten/Kota.

3. Tugas, Fungsi, dan Profil Sekretariat KPU Kota Yogyakarta

Adapun Tugas dan Fungsi Sekretariat KPU Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut :

a. Tugas Sekretariat

1. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu.

3. Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu.
4. membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilihan Gubernur.
5. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota.
6. Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa pemilihan bupati/walikota.
7. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota, dan
8. membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang undangan.

b. Fungsi Sekretariat

1. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu di Kabupaten/Kota.
2. Memberikan pelayanan teknis pelaksanaan Pemilu di Kabupaten/Kota.
3. Memberikan pelayanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, anggaran, dan perlengkapan Pemilu di Kabupaten/Kota.

4. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota.
5. Membantu perumusan, penyusunan dan memberikan bantuan hukum serta memfasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu di Kabupaten/Kota.
6. Membantu pelayanan pemberian informasi Pemilu, partisipasi dan hubungan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten/Kota.
7. Membantu pengelolaan data dan informasi Pemilu di Kabupaten/Kota.
8. Membantu pengelolaan logistik dan distribusi barang/jasa keperluan Pemilu di Kabupaten/Kota.
9. Membantu penyusunan kerjasama antar lembaga di Kabupaten/Kota.
10. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan Pemilu dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota.

c. Profil Sekretariat KPU Kota Yogyakarta

Adapun Profil Sekretariat KPU Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut :

Tabel : 2.7

Profil Sekretariat KPU Kota Yogyakarta

NO	NAMA	JABATAN	KET
----	------	---------	-----

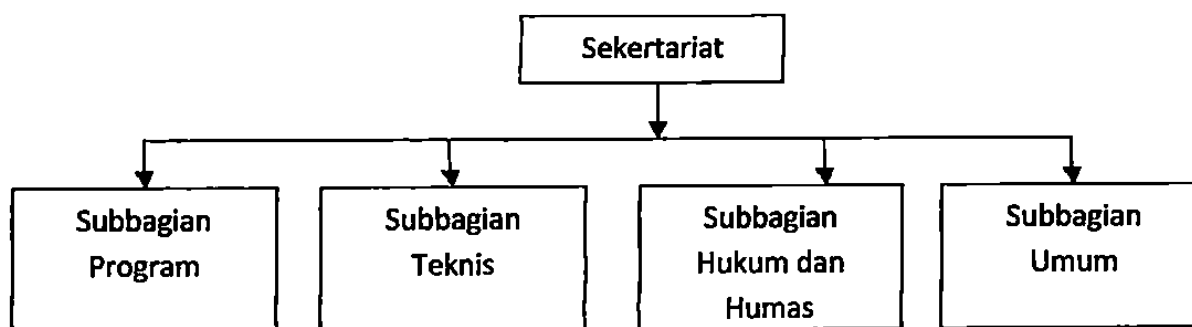
1.	Drs. BASKORO, MSi	Sekretaris KPU	
2.	INDRADI YOHANANTO, S.H	Ka Sub Bag Teknis Pemilu dan Hupmas	
3.	PURBANINGSIH, S.H	Ka Sub Bag Hukum	
4.	WARISNA WIJAYA, S.IP.	Ka Sub Bag Umum	
5.	YURNELIS PILIANG, S.IP, MPA	Ka Sub Bag Program dan Data	

Sumber : Sekertariat KPU Kota Yogyakarta

Adapun struktur sekretariat KPUD Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut :

Bagan : 2.1

**Struktur Organisasi
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kota Yogyakarta**



Dengan perincian tugas sebagai berikut :

1. Subbagian Program

Subbagian program mempunyai tugas menyiapkan penyusunan rencana, program, anggaran bersama dengan subbagian umum,

dan menyiapkan data kegiatan pemilihan umum

2. Subbagian Teknis

Subbagian teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan pelaksanaan teknis penyelenggaraan Pemilu dan proses administrasi dan verifikasi pergantian antar waktu.

3. Subbagian Hukum dan Hubungan Masyarakat

Subbagian Hukum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi, pengkajian, penyuluhan, bantuan, kerjasama antar lembaga dan penyelesaian sengketa hukum, pengawasan pelaksanaan rencana dan program serta melaksanakan pelayanan informasi, sosialisasi peraturan yang berkaitan dengan Pemilu dan peningkatan partisipasi masyarakat.

4. Subbagian Umum

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan penyusunan anggaran bersama dengan Subbagian program, perbendaharaan, verifikasi, dan pembukuan pelaksanaan anggaran, pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, keamanan dalam, tata usaha, pengadaan dan distribusi logistik, kepegawaian, serta dokumentasi.

a. Tata Kerja

1. Dalam melaksanakan tugasnya, Wakil Sekertaris Jenderal KPU, Kepala Biro, Sekertaris KPU Provinsi, Wakil Kepala Biro, Sekertaris KPU Kabupaten/Kota, Kepala Bagian, Kepala Sub-Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan

lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam Sekretariat Jendral KPU, Sekretariat KPU Provinsi, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, serta dengan instansi lain di luar KPU sesuai dengan tugas masing-masing.

2. Setiap Kepala Biro, Sekretaris KPU Provinsi, Wakil Kepala Biro, Sekretaris KPU Kabupaten/Kota, Kepala Bagian dan Kepala Sub-Bagian wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Setiap Kepala Biro, Sekertaris KPU Provinsi, Wakil Kepala Biro, Sekertaris KPU Kabupaten/Kota, Kepala Bagian dan Kepala Sub-Bagian bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksana tugas bawahannya.
4. Setiap Kepala Biro, Sekertaris KPU Provinsi, Wakil Kepala Biro, Sekertaris KPU Kabupaten/Kota, Kepala Bagian dan Kepala Sub-Bagian wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
5. Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi di lingkungan sekretariat Jendral KPU, Sekretariat KPU Provinsi

dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan bahan pemberian petunjuk kepada bawahannya.

6. Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

7. Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka membahas kinerjanya kepada bawahan dan pengambilan keputusan